

**Judul** : Regulasi investasi masih sulit, di atas sudah oke, tapi di bawah menghambat  
**Tanggal** : Kamis, 21 Oktober 2021  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Regulasi Investasi Masih Sulit

# Di Atas Sudah OK, Tapi Di Bawah Menghambat

Senayan memaklumi kekecewaan Presiden Jokowi atas ruwetnya birokrasi investasi di dalam negeri. Walau sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, tetap saja investasi merupakan barang langka di Indonesia.



**Darmadi Durianto**

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengatakan, kemudahan peraturan dan regulasi masuknya investasi ternyata terkendala praktik di lapangan.

"Mental para pejabat pemerintah kita belum siap. Masih ada mental, kenapa harus mudah kalau bisa dipersulit," kata Darmadi di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluhkan masih banyaknya

regulasi dan peraturan yang menghambat investasi.

Jokowi mencontohkan, investasi untuk pembangkit listrik saja jumlahnya mencapai 259 izin dan rekomendasi.

"Itu kalau bawa koper bisa 10. Dan cari izin itu bisa 3 hingga 7 tahun. Harusnya seperti ini yang dipangkas," keluh Jokowi.

Karena persoalan ini pula, Jokowi mengaku sampai malu. Kesempatan masuknya investasi menjadi terbuang.

"Kita sudah bukain pintu, nggak ada respons. Ini yang kadang-kadang saya sering malu. Terus terang saya," katanya.

Kembali ke Darmadi, problem terbesar dan penghambat investasi ada pada sumber daya manusia aparatur saat ini. Sebab, mental aparat yang ada masih *business mentality*, yakni mental pejabat yang merasa dibutuhkan, tidak memiliki jiwa melayani. "Harus ada revolusi mental yang revolusioner," tegasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, Komisi VI DPR menerima banyak keluhan dari investor. Salah satunya dalam investasi di Pembangkit

Listrik Tenaga Panas Bumi atau Geothermal. Sama seperti keluhan Jokowi, sang investor mengaku terpaksa harus bolak-balik lantaran *Power Purchase Agreement* (PPA) tak kunjung tuntas.

Bagi Darmadi, situasi ini tentu buruk. Bukan hanya mencoreng *image* Indonesia di luar, tapi juga menghambat peredaran ekonomi masyarakat di lokasi investasi.

"Mereka sampai teriak-teriak. Mereka merasa orang-orang

Indonesia ini demokrasiya luar biasa mempersulit," katanya.

Apalagi informasi yang diperolehnya, investasi pembangkit panas bumi ini sedianya dibangun di kawasan Indonesia Timur yang memang tingkat elektrifikasinya masih terbilang rendah. Harga pembelian yang ditawarkannya pun lebih murah.

"Mungkin di tim atasnya sudah ok, tapi tim menengah ke bawahnya ini cenderung banyak mempersulit," jelasnya.

Bendahara Umum Megawati Institute ini menilai, pemberdayaan aparatur ini menjadi sangat penting untuk dibenahi saat ini. Izin dan regulasi kemudahan investasi yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi sulit diimplementasikan jika tatanan birokrasi tidak dibenahi. Walau Presiden Jokowi sudah membentuk Satgas Investasi, tapi pergerakannya masih lambat. ■ KAL



**BAHAS POLITIK LUAR NEGERI:** (Dari kiri) Founder KedaikOPI Hendri Satrio, Menteri Luar Negeri Malaysia YB Dato' Saifuddin Abdullah dan Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menjadi pembicara diskusi yang bertema "Memperkuat Peran Politik Luar Negeri ASEAN Dalam Menghadapi Tantangan Global" di Jakarta, kemarin.